



BNNK MALANG

LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MALANG**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang

Jalan Raya Pakisaji No. 166, Kecamatan Pakisaji,

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka good governance, sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Implementasi good governance yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja oleh instansi pemerintah mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna dan merupakan alat kendali dan penilai kualitas kinerja.

Untuk melaksanakan amanah perundang-undangan tersebut, ditetapkan pula Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, disusun dan disampaikan secara sistematis dan lembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini dapat diukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selama tahun 2024, capaian dan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 akan dilaporkan didalam Laporan Kinerja ini, selain itu disampaikan pula antisipasi terhadap hambatan yang ada untuk memperoleh capaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang ini disampaikan, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, evaluasi, dan bahan pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional serta dapat memberikan umpan balik dalam menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang agar lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Malang, Januari 2024

Kepala BNN Kabupaten Malang



Hendratmo Budi Wibowo, S.Pd
Letkol Laut (PM) NRP. 16301/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	4
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. PERJANJIAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	12
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	50
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	51
B. SARAN	51
LAMPIRAN	
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang TA. 2024 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan pada suatu perencanaan strategis. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam dokumen ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis lima tahunan maupun tahunan.

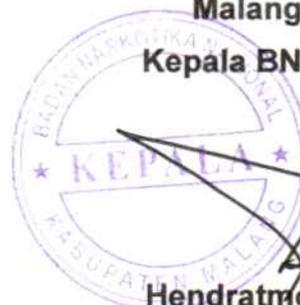
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran kinerja, penetapan tujuan dan sasaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang didasarkan kepada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Dalam menilai dan/atau melihat tingkat kinerja pencapaian tujuan dan sasaran, diperlukan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaiannya.

Pada tahun 2024 Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2024 telah ditetapkan 10 (Sepuluh) sasaran strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja kegiatan, dengan hasil yang dapat disimpulkan yaitu, 6 (Enam) indikator melebihi target, 4 (empat) Indikator kinerja kegiatan yang sesuai target yang dijabarkan laporan ini.

Adapun ukuran tersebut berupa indikasi (indikator kinerja) yang digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja suatu organisasi dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dengan demikian tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan / ketidakberhasilan) pencapaian tujuan dan sasaran dan pada akhirnya kinerja organisasi.

Malang, Januari 2024

Kepala BNN Kabupaten Malang



[Handwritten Signature]
Hendratno Budi Wibowo, S.Pd
Letkol Laut (PM) NRP. 16301/P

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang saat ini dihadapi oleh Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan manusia baik dari segi aspek sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Selain itu, kejahatan narkoba juga telah masuk seluruh pelosok penjuru Indonesia diantaranya di wilayah Kabupaten Malang. Berbagai macam narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah masuk ke wilayah Kabupaten Malang dan masuk ke masyarakat di berbagai kelompok masyarakat tanpa terkecuali dan sasarannya pun tidak hanya di tempat hiburan malam saja, tetapi juga sudah masuk ke sekolah dan lingkungan rumah tangga. Baik itu dari kalangan yang mampu ataupun dari kalangan tidak mampu.

Dampak negatif kejahatan Narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat dari segi aspek sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang ada di Kabupaten Malang. Jaringan Pengedar Narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas dengan komitmen bersama dan peran aktif seluruh elemen masyarakat mulai unsur Pemerintah, Swasta, Penegak hukum, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan/Sekolah, LSM, dan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, dari anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, dan para pekerja, baik yang bekerja di dalam wilayah Kabupaten Malang ataupun di luar Kabupaten Malang.

Dalam mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Malang, BNN Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan serta meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan seluruh unsur elemen (Pemerintah, Dunia Usaha, Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat) yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

Upaya di Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan terus dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang melalui Penyelenggaraan Advokasi P4GN, Pengelolaan informasi dan Edukasi, dan program pemberdayaan anti narkoba. Seksi Rehabilitasi melalui fasilitas rehabilitasi narkoba instansi pemerintah, paket layanan rehabilitasi dan fasilitas rehabilitasi narkoba komponen masyarakat. Seksi Pemberantasan melalui berkas perkara tindak pidana narkotika.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dalam Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan demikian BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNN Kabupaten Malang melaksanakan program P4GN yang didukung dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 35 orang, yang terdiri dari :

Tabel. Jumlah SDM BNN Kabupaten Malang Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah (orang)
1	TNI	1
2	Polri	4
3	PNS	12
4	TKK	18
Jumlah		35

**Tabel. Jumlah SDM BNN Kabupaten Malang
Berdasarkan Golongan Pegawai**

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	15
3	Golongan II	1
4	TKK	18
Jumlah		35

Selain Sumber Daya Manusia, untuk menjalankan fungsi organisasi dibutuhkan juga Sumber Daya Anggaran. Berikut adalah perubahan anggaran BNN Kabupaten Malang T.A. 2024;

No	Anggaran	+/-	Keterangan
1	Rp. 1.847.530.000	-	Anggaran awal.
2	Rp. 1.812.530.000	(Rp. 35.000.000)	Pada Bulan April terdapat penurunan Pagu karena terdapat kebijakan Pusat untuk mengalihkan KRO 5354 ke DIPA BNNP.
3	Rp. 1.895.586.000	Rp. 83.056.000	Pada Bulan Juli terdapat Penambahan target PNBPN semula 200 orang menjadi 558 orang.
4	Rp. 1.769.211.000	(Rp126.375.000)	Pada Bulan Agustus terdapat penurunan Pagu karena anggaran Blokir yang diambil Kemenkeu.
5	Rp. 2.010.955.000	Rp 241.744.000	Pada Bulan Oktober terdapat Penambahan target PNBPN semula 558 orang menjadi 1.600 orang.
5	Rp. 2.173.455.000	Rp 162.500.000	Pada Bulan November Penambahan anggaran yang berasal dari Hibah Pemkab Malang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Prepres Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 BNN Kabupaten Malang, Nomor: SP DIPA- 066.01. 689622/2024, Revis 13 tanggal 24 Desember 2024.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, meliputi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Malang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan di wilayah Kabupaten Malang;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama di wilayah Kabupaten Malang;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Malang;
- e. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Malang; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Malang.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.





Struktur Organisasi BNN KABUPATEN MALANG



Kepala BNN Kabupaten Malang
Letkol Laut (PM) Hendratmo Budi Wibowo, S.Pd.
NRP. 16301/P

Kasubbag Umum
Brama Tri Yoga AL, S.I.Kom.
NIP. 19870602 201212 1 001

Pengelola Data Subbag Umum / Katim Rehab
Nova Dwi Hartanto, A.Md
NIP. 19891110 201403 1 003

Pengadministrasi Umum
Syaiful Ari Purnawan
NIP. 19790201 200604 1 013

Pengadministrasi Umum
Ririn Yuniawati, S.E.
NIP. 19780616 200903 2 005

Penyuluh Narkoba Ahli Muda / Katim P2M
Citra Purnamasari, S.I.Kom
NIP. 19861016 201403 2 003

Penyidik BNN Ahli Muda / Katim Pemberantasan
Dedi Firmansya H, SH.
NIP. 19850905 201212 1 002

Penyuluh Narkoba Ahli Muda
Nurteta Wulansari, S.I.Kom
NIP. 19890913 201212 2 001

Analisis APBN Ahli Pertama
Lisa Apriani, S.Pd.
NIP. 19900316 201502 2 001

Perawat Mahir
Novan Arief P, AMK
NIP. 19901127 201403 1 002

Penasihat Keuangan APBN Mahir
Vita Purnasari, A.Md
NIP. 19881128 201502 2 002

Analisis Data dan Informasi
Winarni, SS
NIP. 19770207 199803 2 001

Analisis Intelijen
Irawanto, S.Pd.
NRP. 74060364

Penyidik
Andika Chandra Susila, S.Psi
NRP. 84110211

Penyidik
Yanuar Subekti, SH.
NRP. 88010597

Analisis Intelijen
Choirun Wahyu S., SH.
NRP. 88060444

Verifikator Keuangan
Ratna Ariningtyas, AMKL
NIP. 19880124 201403 2 002

Penyuluh / Staf P2M
Yusuf Nugraha, SE

Konselor / Staf Rehabilitasi
Retno Pratiwi, S.Psi

Perawat / Staf Rehabilitasi
Ns. Dwiyan Budi P, S.Kep.

Pramubhakti / Staf Pemberantasan
Tri Choiratul A, SKM

Satpam
Agus Aprilianto

Satpam
Yulius Riadianto

Penyuluh / Staf Bag. Umum
Wicaksono, S. Pd.

Pramubhakti / Staf Bag Umum
Luluk Maslukah, S.AP

Pengemudi / Staf Bag. Umum
Hendri Santoso, SH

Satpam / Staf P2M
Edi Purnomo

Satpam
Zaenal

Pengemudi
Sugeng Aris T.

Penyuluh / Staf Bag. Umum
Rusdiyansyah Alfian, SE

Dokter / Staf Rehabilitasi
dr. Evi Desi Puspa Lis Santi

Pramubhakti / Staf P2M
Rahmadhani Dwi A, S.Tr.Kes.

Satpam
Widji Sugiarto

Satpam
Adi Mulyo Puguh Riyadi

Pramubhakti
Setyo Budi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika , BNN Kabupaten Malang merumuskan arah kebijakan pelaksanaan program di wilayah kerjanya secara sistematis, terukur dan terarah untuk mewujudkan sasaran strategis BNN dan menyelaraskan arah kebijakan dan strategi operasional unit kerja Eselon I. Kebijakan BNN Kabupaten Malang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengawasan titik masuk jalur peredaran narkotika dan kapasitas kerjasama P4GN
BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan ini untuk menekan masuknya narkoba ke dalam wilayah kerja BNN Kabupaten Malang dengan penguatan sarana dan prasarana terkait pengawasan.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas P4GN
BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan ini untuk meningkatkan kemampuan dan hasil guna dari seluruh intervensi yang telah dilakukan;
3. Peningkatan pemberdayaan, Partisipasi dan Kedayatanggapan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika
BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk adanya inovasi dalam program desiminasi informasi melalui media elektronik, cetak dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, dan penyediaan saluran informasi untuk menyampaikan informasi terkait tindakan penyalahgunaan;
4. Penyelamatan dan perlindungan bagi Pengguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi
BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi Pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi (rehabilitasi rawat jalan) di klinik BNN Kabupaten Malang dan mendorong fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi bagi warga yang mengakses layanan tersebut sehingga meminimalisir kemungkinan relapse;

5. Penguatan Jaringan dan Kerjasama Kelembagaan
BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk dapat memperluas jaringan dan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk dapat melaksanakan program P4GN secara efektif di wilayah Kabupaten Malang;
6. Penataan dan Penguatan Kelembagaan untuk Memperbaiki Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di BNN Kabupaten Malang;
BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM, peningkatan tata kelola organisasi, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik oleh BNN Kabupaten Malang.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	55,86 Indeks	Rp. 82.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	93,125 Indeks	Rp. 106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks	3.70 Indeks	Rp. 211.695.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		masyarakat dalam penanganan P4GN	Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kabupaten Malang		
4	Pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	Rp 6.945.000
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp. 14.890.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	Rp. 900.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	Rp. 48.209.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,58 Indeks	Rp 6.945.000
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	87 Indeks	Rp. 5.080.000
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kabupaten Malang	99,76 Indeks	Rp. 1.051.895.000

C. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang yang disepakati mencakup sasaran strategis beserta indikator keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	55,86 Indeks
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	93,125 Indeks
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,70 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks
9	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,76 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, dengan melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan. Pada tahun 2024 Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2024 telah ditetapkan 10 (Sepuluh) sasaran strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja kegiatan, dengan hasil yang dapat disimpulkan yaitu, 6 (Enam) indikator melebihi target, 4 (empat) Indikator kinerja kegiatan yang sesuai target. Berikut realisasi tahun 2024:

Tabel Realisasi Capaian Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55,86 Indeks	55,86 Indeks	100 %
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	93,125 Indeks	94,375 Indeks	101,34 %
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,70 Indeks	3,72 Indeks	100,5%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	82,81 %	121,78 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2Unit	100 %
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks	3,53 Indeks	103,2 %
9	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	100 Indeks	115 %
10	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,76 Indeks	100 Indeks	100,3 %

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNN Kabupaten Malang selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diukur menggunakan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55,86 Indeks	55,86 Indeks	100 %

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

Ketercapaian tersebut diukur menggunakan penghitungan capaian indikator nilai indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan metode survei kepada remaja sebagai responden melalui sistem evaluasi (aplikasi Dektari Aja) oleh Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI, dimana hasilnya akan dapat memberikan gambaran kualitatif tinggi rendahnya Ketahanan Diri Remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Metode pengukuran yang dipakai dalam menentukan Indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan cara survei ketahanan diri dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri *ADS (Anti Drugs Scale)* yang mencakup 3 dimensi yaitu :

- 1) **Self regulation** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- 2) **Dimensi Assertiveness** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.
- 3) **Dimensi Reaching Out** yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Secara teknis pengukuran indeks ketahanan diri remaja ini melalui beberapa tahap di antaranya :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan data pada kegiatan sosialisasi tatap muka dengan pengisian kuesioner di aplikasi kuesioner online dektari BNN pada alamat website di www.dektari.bnn.go.id.
- 2) Mengukur tingkat Ketahanan Diri (Anti) Narkoba dari remaja sebagai faktor internal dengan menggunakan alat ukur Ketahanan Diri (Anti) Narkoba (Anti Drugs Scale/ ADS).
- 2) Mengukur faktor eksternal dari lingkungan remaja berupa data dukung tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan kegiatan positif dari remaja di lingkungan sekolah/ kampus sebagai Data Sekunder.
- 3) Mengukur faktor Dependen berupa evaluasi atas Target Capaian Kegiatan Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten/ Kota. Faktor Dependen didapat dari capaian output 1 (Satu) kegiatan di BNNK (Informasi & Edukasi melalui Kampanye/ Pagelaran Seni).

Pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja telah ditetapkan target nilai indeks ketahanan diri remaja sebesar 55,86 Indeks dan tercapai sebesar 55,86 Indeks atau 100 % dengan klasifikasi nilai indeks pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan Surat Kepala BNN Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN Tanggal 24 Desember 2024 Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024.

Dan dalam mencapai nilai tersebut BNN Kabupaten Malang telah melaksanakan rangkaian upaya kegiatan sebagai pendukung dalam pengukuran dan penghitungan capaian nilai ketahanan diri remaja diantaranya, yaitu :

- 1) Kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika dan Dialog Interaktif Remaja (usia 12 – 21 tahun) berdomisili di wilayah Kab. Malang yang diberikan berbagai informasi untuk mengembangkan skill dengan acuan 3 dimensi diatas yang menjadikan remaja mampu menolak bahaya narkoba, dan hal ini merupakan pendukung dari faktor Internal serta data dukung tingkat kasus narkoba dan kegiatan positif di lingkungan remaja (responden) baik Sekolah/ Kampus merupakan faktor pendukung eksternal (Data Sekunder)

- 2) Kegiatan Informasi dan Edukasi melalui media Online dan Radio, Branding P4GN pada Sarana Publik dan Talkshow P4GN sebagai pendukung faktor Dependen (evaluasi Kegiatan).

Dalam tahun 2024 telah dilakukan kegiatan untuk dalam mencapai sasaran kinerja ini. Kegiatan ini adalah Dialog Interaktif Remaja merupakan kegiatan Prioritas Nasional dari Deputi Pencegahan BNN RI, dengan indikator kinerja dilihat dari Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari Aja). BNN Kabupaten Malang telah melakukan kegiatan ini bersama 5 (lima) sekolah setingkat SMP/MTs di sekitar Desa Bersih Narkoba Kabupaten Malang Tahun 2024, tepatnya di wilayah Kecamatan Gondanglegi. :

Tabel Kegiatan Dialog Interaktif Remaja di BNN Kabupaten Malang TA. 2024

NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PESERTA	JUMLAH PESERTA/ SEBARAN
Dialog Interaktif Remaja	Juli 2024	Kecamatan Gondanglegi	1. MTs Negeri 1 Malang 2. MTs Shirothul Fuqoha 3. SMP Negeri 1 Gondanglegi 4. SMP Negeri 2 Gondanglegi 5. SMP Modern Al Rifaie	Peserta Dialog Interaktif : 10 orang

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba Tahun 2023 yang sebesar 55,86 Indeks, maka capaian realisasi di Tahun 2024 ini mengalami stagnan dengan capaian 55,86 Indeks. Untuk prosentase capaian hasil indeks di tahun 2022 s.d tahun 2024 mengalami keberhasilan capaian yang telah ditentukan, berikut merupakan tabel perbandingan capaian nilai dektari:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2022	52 Indeks	57 Indeks	Sangat Tinggi
2	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2023	53 Indeks	55,86 Indeks	Sangat Tinggi
3	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2024	55,86 Indeks	55,86 Indeks	Sangat Tinggi

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

1. Koordinasi secara intensif kepada lingkungan sasaran para responden dalam memberikan fasilitas (waktu, sarana prasarana dan lainnya) sehingga dalam pengisian kuesioner menjadi lebih maksimal.
2. Kreatifitas penyuluh narkoba dalam memberikan informasi baik materi P4GN maupun tata cara pengisian kuesioner Dektari Aja sehingga memudahkan responden dalam memahami dan mengisi kuesioner tersebut.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

Tidak adanya kendala yang berarti dihadapi selama pelaksanaan program, namun Hasil Indeks Ketahanan Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba tidak lagi dapat dimonitoring setiap waktu seperti pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Remaja di Kabupaten Malang masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Informasi dan Edukasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja
 Anggaran Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba senilai Rp82.000.000,- dengan Rp81.963.500,- atau 99,96%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	100	99,96	0,04

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

Untuk mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja di Kabupaten Malang yang sudah mencapai kategori sangat tinggi (55,86 Indeks), BNN Kabupaten Malang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan engagement dengan para remaja di Kabupaten Malang agar tetap mengingat dan menanamkan 3 (Tiga) Dimensi dalam Ketahanan Diri Remaja yaitu Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out melalui program Informasi dan Edukasi P4GN yang relevan dengan nilai-nilai dalam dimensi Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba melalui pembuatan konten, maupun penyuluhan langsung tatap muka. Pelaksanaan program informasi dan edukasi tidak hanya bergantung pada anggaran DIPA BNN Kabupaten Malang, melainkan juga berkolaborasi dengan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di institusi Pendidikan atau sekolah-sekolah.

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	93,125 Indeks	94,375 Indeks	101,34 %

Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan Survei Ketahanan Keluarga pada peserta (20 orang dari sepuluh keluarga) yang mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Survei dilaksanakan dengan menggunakan instrumen *SDQ (Strengths and Difficulties)*, *PAFAS (Parent and Family Adjustment Scales)*, dan *CYRM (Child and Youth Resiliences Measure)* dengan rincian kuesioner sebagai berikut :

- 1) Kuesioner Demografi (diisi oleh orang tua pada pertemuan 1)
- 2) Pre Test (diisi oleh orang tua pada pertemuan 1)
 - Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner CYRM : diisi oleh anak
- 3) Post Test (Pertemuan 4)
 - Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner CYRM : diisi oleh anak

- 4) Angket Kepuasan Intervensi (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- 5) Indeks Ketahanan Keluarga (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- 6) Kuesioner terkait Pembentukan Desa Bersinar disesuaikan dengan Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (diisi oleh Kepala Desa yang menjadi target output BNN Kab/Kota).

Pada program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, BNN Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengundang sepuluh keluarga yang terdiri dari sepuluh orang tua dan sepuluh anak dari 1 lokus Desa Bersinar dari Desa Landungsari Kecamatan Dau. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis & Pelaksanaan dari Deputi Pencegahan Direktorat Advokasi BNN RI pada Modul Ketahanan Keluarga sebanyak 4 kali, dengan didampingi oleh 2 Penyuluh Narkoba BNN Kabupaten Malang.

Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ; a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 174 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dengan target nilai indeks sebesar 93,125 Indeks terealisasi sebesar 94.375 Indeks dengan klasifikasi kategori sangat tinggi yang dapat diartikan tingginya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hasil nilai tersebut sesuai Berdasarkan Surat Kepala BNN Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN Tanggal 23 Desember 2024 tentang Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024.

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang sebesar 93,125 Indeks maka capaian di Tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 1,34% dengan capaian 94,375 Indeks. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2022	78,58 Indeks	84,45 Indeks	Sangat Tinggi
2	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2023	78,69 Indeks	93,125 Indeks	Sangat Tinggi
3	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2024	93,125 Indeks	94,375 Indeks	Sangat Tinggi

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya mewujudkan Kabupaten Malang bersih narkoba melalui pembentukan regulasi P4GN. Dengan adanya hal tersebut berdampak dalam meningkatkan komitmen lingkungan sasaran program (Pemerintah Desa dan masyarakat) dalam mewujudkan Desa Bersinar.
2. Pendampingan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

Tidak adanya kendala yang berarti dihadapi selama pelaksanaan program, namun Hasil Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat langsung diketahui meskipun survei Ketahanan Keluarga telah selesai dilaksanakan dan hasilnya juga telah diisikan ke dalam link sesuai dengan petunjuk dari pusat. Sistem dari link tersebut hanya berfungsi untuk menerima data tetapi

tidak langsung dapat mengeluarkan hasil perhitungannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai Indeks Ketahanan Keluarga di Kabupaten Malang masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari Dir. Advokasi pusat. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses monitoring dan upaya perbaikan capaian kinerja. Lebih lanjut hal tersebut juga cukup menghambat proses pelaporan kinerja.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Anggaran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Rp106.000.000,- dengan realisasi Rp105.683.500,- atau 99,70%. Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	101,34	99,70%.	1,64%

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

Untuk mempertahankan nilai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Malang yang sudah mencapai kategori sangat tinggi (94,375 Indeks) BNN Kabupaten Malang akan mengevaluasi metode Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang telah dilaksanakan guna mempertahankan realisasi kinerja program Ketahanan Keluarga yang lebih maksimal.

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks Kemandirian Partisipatif	3,70 Indeks	3,72 Indeks	100,5%

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam rangka upaya P4GN yang terdiri dari: lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll). Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi nantinya dilaksanakan setelah peserta menjadi Penggiat Anti Narkoba yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan ada tidaknya masukan (input), aktifitas (output) dan dampak (outcome) pemberdayaan anti narkoba di instansi/ lingkungan masing-masing.

Pengukuran dilakukan melalui Survei Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dengan kuesionernya yang berisi pertanyaan dengan variabel sebagai berikut:

1) SDM(Sumber Daya Manusia)

Adanya pelaku/ pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

2) Metode

Adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.

- 3) Anggaran
Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.
- 4) Material
Adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya
- 5) Sistem (Kebijakan)
Adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- 6) Aktivitas
Adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

No	Variabel	Indikator Keberhasilan	Bobot Nilai/ Mutu
1	Aspek SDM	Tokoh dan penggiat yang mendukung P4GN	20%
2	Aspek Metode	Melakukan kegiatan penyuluhan pelatihan dan tes urine	10%
3	Aspek Anggaran	Dana swadaya/sponsorship/bantuan Pemerintah untuk kegiatan P4GN	20%
4	Aspek Material	Adanya regulasi/aturan/norma/kebijakan	20%
5	Aspek Sarpras	Adanya alat pendukung, media promosi kegiatan P4GN	10%
6	Aspek Aktifitas	Pelaksanaan Upaya P4GN di lingkungannya	20%

Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Malang sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target Nilai Kemandirian Partisipatif (IKP) sebesar 3,70 Indeks terealisasi sebesar 3,72 Indeks yang dapat diartikan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya P4GN dengan karakteristik kriteria sangat mandiri. Nilai tersebut didapat dari hasil pengukuran menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner IKP berisikan pertanyaan dan variabel indikator tinggi rendah bobot nilainya sesuai

(Surat Kepala BNN RI Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN Tanggal 11 Desember Tentang Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024).

Dalam upaya mendukung ketercapaian target Nilai IKP, BNN Kabupaten Malang juga melaksanakan kegiatan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba meliputi rangkaian kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Workshop/ Bimbingan Teknis, Tes Urine, Monitoring Evaluasi Program dimana hal itu dilakukan kepada sasaran program yang telah ditentukan.

Formula	Keterangan
$IKP = (IKP1 + IKP2) / 2$ $= (3,72 + 3,72) / 2$ $= 3,72$	IKP1 : nilai hasil pengisian kuesioner sasaran ke -1 IKP2 : nilai hasil pengisian kuesioner sasaran ke -2 IKP : nilai hasil penjumlahan rata rata nilai IKP sasaran

Dan berikut merupakan gambaran hasil pengukuran dan penghitungan hasil nilai IKP tahun 2024 melalui penjumlahan nilai rata rata dari 2 sasaran target yaitu lingkungan Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan. Lingkungan Instansi Pemerintah yaitu Pemerintah Kecamatan Gondanglegi yang diwakili oleh Kasi Trantibum sebagai Penggiat P4GN dengan nilai IKP sebesar 3,72 Indeks dan Lingkungan Pendidikan yaitu MTs Negeri 1 Malang yang diwakili oleh Guru BK sebagai Penggiat P4GN dengan nilai IKP 3,72 Indeks. Maka dari perhitungan 2 lembaga didapatkan hasil total capaian sebesar 3,72 Indeks (Sangat Mandiri).

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Dibandingkan capaian kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), dimana capaian pada 2023 sebesar 3.70 Indeks (kriteria sangat mandiri) dengan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) sasaran pengukuran kepada 2 lingkungan (Instansi Pemerintah dan Masyarakat) tahun 2024 meningkat naik menjadi 3,72 Indeks (kriteria sangat mandiri) dengan jumlah sasaran pengukuran kepada 2 sasaran lingkungan (Pemerintah dan Masyarakat).

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	2022	3,20 Indeks	3,38 Indeks	Sangat Mandiri
2	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	2023	3,25 Indeks	3,70 Indeks	Sangat Mandiri
2	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	2024	3,70 Indeks	3,72 Indeks	Sangat Mandiri

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya P4GN dengan terbitnya beberapa Regulasi/Peraturan tentang P4GN:
- 2) Pemberian informasi P4GN secara Intensif diikuti dengan informasi adanya regulasi terkait P4GN dalam rangka mendorong peran serta seluruh unsur lingkungan mewujudkan Kabupaten Malang Bersih Narkoba (Bersinar).

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

Tidak adanya kendala dalam pencapaian pengukuran Nilai IKP.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Anggaran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Rp6.945.000,- dengan realisasi Rp6.915.000,- atau 99,57%. Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	100,5	99,57	0,93%

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

Untuk mempertahankan nilai IKP terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Malang yang sudah mencapai kategori sangat mandiri (3,72 Indeks) BNN Kabupaten Malang akan mengevaluasi metode IKP yang telah dilaksanakan guna mempertahankan realisasi kinerja yang lebih maksimal.

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %	82,81 %	121,78 %

Nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi adalah angka indeks tingkat keterpulihan suatu kawasan rawan yang telah dilakukan intervensi melalui program P4GN pelaksanaan program Intervensi merupakan indikator dalam mendukung perubahan suatu wilayah rawan menjadi pulih. Di tahun 2024 terdapat 1 sasaran kawasan rawan yaitu Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen yang di intervensi program P4GN dengan target nilai keterpulihan sebesar 2.51 sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan terealisasi sebesar 3.05. Ketercapaian nilai tersebut didapatkan melalui proses pengukuran dan perhitungan atas variabel, sub variabel dan indikator dari faktor-faktor yang menunjukkan perubahan keterpulihan dari kondisi semula (rawan narkoba) pada periode tertentu yang ditunjukkan dengan angka skala melalui metode sampling dan penyebaran kuesioner dan teknik wawancara.

Berikut merupakan rangkaian program intervensi P4GN yang dilaksanakan BNN Kabupaten Malang dalam meningkatkan upaya pemulihan kawasan rawan narkoba secara berkelanjutan diantaranya :

- Pelaksanaan pemetaan kawasan rawan narkoba pada Desa Ngadilangkung Kepanjen melalui pengumpulan data dan informasi actual kawasan rawan:
- Pelaksanaan koordinasi sinergitas dengan seluruh unsur/ Stakeholder di wilayah kawasan rawan:
- Pelaksanaan pemberdayaan alternatif melalui pelatihan life skill bagi masyarakat kawasan rawan dengan jenis kewirausahaan kreasi hantaran dan tas souvenir:
- Pelaksanaan pencegahan (Komunikasi Informasi dan Edukasi/KIE, Advokasi, program Desa Bersinar), Program pemberdayaan masyarakat (deteksi dini narkoba, pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba), program rehabilitasi serta kegiatan pemberantasan.

Sedangkan dalam pengukuran nilai keterpulihan kawasan kawan (IKKR) dilakukan penghitungan merujuk pada Juknis IKKR Deputi Bidang Dayamas BNN yaitu :

8 INDIKATOR POKOK	5 INDIKATOR PENDUKUNG
1. Kasus kejahatan Narkoba	1. Banyak TEMPAT HIBURAN
2. Angka Kriminalitas/aksi kekerasan	2. Tempat kost dan hunian dgn Privacy tinggi
3. Bandar Pengedar Narkoba	3. Tingginya Angka Kemiskinan
4. Kegiatan Produksi Narkoba	4. Ketiadaan Sarana Publik
5. Angka Pengguna Narkoba	5. Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat
6. Barang Bukti Narkoba	
7. Entry Point Narkoba	
8. Kurir Narkoba	

- Penetapan variabel tentang tingkat keterpulihan kawasan dan tingkat keberhasilan program intervensi pada kawasan rawan dengan indikator 13 variabel pendukung;
- Pengumpulan data kuesioner berstruktur yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan berisikan 13 indikator keterpulihan kawasan dan 7 indikator keberhasilan program dengan teknik wawancara kepada responden di wilayah kawasan rawan;
- Pembobotan sebagai alat ukur tingkat kerawanan Narkoba di suatu wilayah dengan bobot nilai didapatkan dari mengkoding jawaban kuesioner berisikan 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung.

Berikut formula yang digunakan dalam menghitung nilai IKKR

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKKR	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Indikator Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup baru ada di perjanjian Kinerja pada Tahun 2023, sehingga hanya bisa dibandingkan antara tahun 2024 dan tahun 2023. Realisasi Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup TA. 2024 telah melebihi target, namun jika dibandingkan dengan realisasi 2023 realisasinya mengalami penurunan.

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	2023	62 %	85,94 %	138,61 %
	2024	62 %	82,81 %	121,78 %

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

- 1) Dukungan dan komitmen seluruh unsur lingkungan dan stakeholder terkait dalam peran serta bersama mewujudkan Kabupaten Malang bersih narkoba khususnya di wilayah sasaran program.
- 2) Pendekatan secara berkala dan berkelanjutan dalam penyampaian informasi rangkaian dan tahapan pelaksanaan program kepada sasaran.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

Kurang maksimalnya rangkaian tahapan program dikarenakan program tersebut merupakan suatu hal baru bagi masyarakat pada kawasan rawan, sehingga hal itu membutuhkan waktu dan pendekatan khusus dalam pelaksanaan program.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Anggaran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Rp6.945.000,- dengan realisasi Rp6.915.000,- atau 99,57%. Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	121,78	99,57	22,21%

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

Untuk mempertahankan nilai IKP terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Malang yang sudah mencapai kategori sangat mandiri (3,72 Indeks) BNN Kabupaten Malang akan mengevaluasi metode IKP yang telah dilaksanakan guna mempertahankan realisasi kinerja yang lebih maksimal.

5 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah petugas IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

Jumlah petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih adalah petugas yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya. Program IBM dilakukan dengan memberdayakan Agen Pemulihan (AP) yang merupakan kader IBM di desa/kelurahan.

Pengukuran dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas IBM yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Malang sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target 10 orang terealisasi sebanyak 10 orang atau 100%.

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Dibandingkan capaian kinerja IBM TA. 2023, dimana capaian pada 2023 sebesar 10 Orang maka tahun 2024 masih sama yakni terealisasi 10 Orang.

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2022	5 Orang	5 Orang	100 %
2	2023	10 Orang	10 Orang	100 %
3	2024	10 Orang	10 Orang	100 %

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

- 1) Petugas AP (Agen Pemulihan) yang sudah dilatih oleh BNN Kabupaten Malang berpartisipasi dan aktif dalam menjalankan program IBM di desa masing-masing.
- 2) Dukungan dari perangkat desa untuk kegiatan klien IBM.
- 3) Klien IBM mendapatkan lifeskill program pendampingan IBM dari Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

Petugas AP masih belum bisa mandiri sehingga BNN Kabupaten Malang masih harus mendampingi dan mengevaluasi dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan IBM yang dilakukan oleh Petugas AP.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Anggaran pada Indikator Jumlah petugas IBM yang terlatih senilai Rp14.890.000,- dengan realisasi 99,87%. Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas IBM yang terlatih	100	99,87	0,13%

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

BNN Kabupaten Malang mensosialisasikan administrasi pelaporan secara akuntabel kepada Petugas AP.

6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Pada Sasaran Kinerja Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika terdapat dua indikator yaitu :

- 1) Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional;
- 2) Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional.

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Dalam proses rehabilitasi dapat dilakukan di lembaga fasilitasi rehabilitasi. Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

Pada tahun 2024 Kabupaten Malang sudah terdapat 3 (tiga) lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu Klinik Pratama BNN Kabupaten Malang, RSJ Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang dan Hayunanto Medical Center (HMC) pada tahun 2024 ditunjuk sebagai Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat di BNN Kabupaten Malang sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/142/I/De/Rh.02.03/2024/Bnn Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024, Perihal Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Adapun data rekapitulasi pencandu/ penyalah narkoba yang melapor dan ditangani di lembaga rehabilitasi BNN Kabupaten Malang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NAMA	TARGET KLIEN	REALISASI RJ	KET
Klinik pratama BNN Kabupaten Malang	10	13	Rawat Jalan

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indikator Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional capaian realisasi dari tahun ke tahun tetap sama sesuai dengan target tahunan.

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2022	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %
2	2023	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %
3	2024	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

- 1) Sebagian besar klien berasal dari rekomendasi hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim TAT BNN Kabupaten Malang;
- 2) Menyampaikan kepada masyarakat saat kegiatan sosialisasi agar melaporkan korban penyalahgunaan narkoba kemudian dibawa ke Klinik BNN Kabupaten Malang untuk dilakukan rehabilitasi.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

- 1) Sebagian besar masyarakat masih belum memahami program rehabilitasi yang ada sehingga belum ada kesadaran untuk melaporkan diri/ keluarga;
- 2) Masyarakat masih beranggapan bahwa penyalahguna narkoba akan pulih setelah dipenjara bukan direhabilitasi.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Anggaran pada Indikator Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional senilai Rp900.000,- dengan realisasi 100%. Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	100	100	0

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

Melakukan penyampaian program rehabilitasi dan mindset tentang pandangan pecandu/ korban penyalahgunaan narkoba khususnya kepada pihak masyarakat/ desa saat melakukan koordinasi.

7. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Indikator yang kedua pada sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah jumlah desa yang ditunjuk untuk melaksanakan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Pada tahun 2024 ini BNN Kabupaten Malang menunjuk Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi . Kedua desa ini merupakan salah satu Desa yang ditunjuk BNN Kabupaten Malang untuk dicanangkan menjadi Desa Bersinar di Kabupaten Malang. Adapun data IBM sebagai berikut :

No	Nama IBM	Lokasi	Target Klien	Realisasi
1	Sepanjang Mantap	Ds. Sepanjang	5	6
2	Landungsari Bersinar	Ds. Landungsari	5	5

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi Indikator Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional mengalami penurunan dengan tahun sebelumnya, namun target realisasi tetap tercapai.

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2022	2 Unit	2 Unit	100 %
2	2023	2 Unit	3 Unit	150 %
3	2024	2 Unit	2 Unit	100 %

Penurunan Realisasi target dikarenakan pada saat penyusunan Target Output RKAKL T.A. 2024, sesuai arahan dari Perencana Deputi Rehabilitasi bahwa yang dimasukkan ke dalam Target Output Lembaga Rehabilitasi adalah Lembaga Rehabilitasi di luar Klinik BNN. Sehingga yang masuk target output adalah 2 Lembaga yaitu RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan Hayunanto Medical Center. Sedangkan Pada Tahun 2023 Klinik Pratama BNN yang termasuk Lembaga Rehabilitasi Internal menjadi capaian target.

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

- 1) Adanya dukungan dari stakeholder di Desa yaitu Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Petugas Kesehatan untuk mendukung P4GN;
- 2) Agen pemulihan yang mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan Kegiatan Rehabilitasi di Desanya sehingga IBM berjalan lancar sesuai bimbingan BNN Kabupaten Malang;
- 3) Klien yang mempunyai motivasi ingin sembuh dari ketergantungan sehingga mengikuti Program IBM dengan patuh dan sampai selesai.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

- 1) Adanya kekhawatiran masyarakat untuk mengikuti program layanan IBM;
- 2) Adanya kesibukan dari anggota IBM maupun klien sehingga kadang-kadang dilakukan penjadwalan ulang kegiatan.
- 3) Tingginya stigma di masyarakat tentang penyalahguna narkoba yang dianggap sebagai aib dan harus dijauhi;
- 4) Adanya misinformasi di masyarakat bahwa penyalah guna narkoba pasti akan diproses secara hukum oleh aparat yang berwenang;
- 5) Penyalah guna narkoba yang berdomisilidi pedesaan cenderung mengalami kesulitan untuk mengakses layanan rehabilitasi yang sebagian besar masih terbatas letaknya di kota besar. Hal ini membatasi akses mereka terhadap layanan dalam hal jarak, waktu maupun biaya.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Anggaran pada Indikator Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional senilai Rp48.209.000,- dengan realisasi Rp48.194.000 atau 99,97%. Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	150	99,97	50,03%

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

- 1) Koordinasi dengan desa tentang penjadwalan ulang kegiatan IBM;
- 2) Melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada petugas IBM;
- 3) Meminta pihak desa dan petugas IBM agar mensosialisasikan program IBM kepada masyarakat secara luas.

8. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,42 Indeks	3,53 Indeks	103,2%

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi yang dilakukan merupakan suatu kewajiban bagi kementerian/lembaga yang memberikan pelayanan publik bagi Masyarakat melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Indeks Kepuasan Pelanggan sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah berdasarkan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa untuk mengetahui program mutu, apapun bentuk organisasinya keberhasilan dari program mutu tersebut diukur dari kepuasan pelanggan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan IKM, karena masyarakatlah yang menerima pelayanan dan yang menilai pemberi pelayanan. IKM juga dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Hasil didapatkan dari Deputi Rehabilitasi BNN RI yang telah melakukan survey kepada masing-masing klien langsung yang diminta mengisi pertanyaan yang telah diberikan melalui daring dan dinilai langsung oleh pihak ketiga (Theta Statistik) yang ditunjuk pihak Deputi Rehabilitasi BNN RI. Selama survey Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang dilaksanakan, terdapat 10 orang klien yang memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan nilai IKM BNN Kabupaten Malang sebesar 3,53 Indeks yang termasuk kategori mutu **Sangat Baik (A)**.

Hasil Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat.

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Tahun 2024 dengan realisasi Tahun sebelumnya mengalami penurunan, namun realisasi tetap melebihi target. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian :

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2022	3,20 Indeks	3,42 Indeks	106,87 %
2	2023	3,20 Indeks	3,57 Indeks	111,56 %
3	2024	3,42 Indeks	3,53 Indeks	103,2 %

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

- 1) Klien Disiplin mengikuti rangkaian kegiatan rehabilitasi sehingga kualitas hidup klien bisa lebih baik dari sebelumnya;
- 2) Data yang diambil berasal dari hasil pengisian IKM klien BNN Kabupaten Malang nilai akhir IKM BNNK kabupaten Malang Jawa Timur bernilai 3,53 Indeks yang termasuk kategori mutu **Sangat Baik (A)**.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

- 1) Klien tidak segera mengisi survey IKM sesuai waktu yang ditentukan sehingga proses data menjadi terlambat;
- 2) Seringkali jadwal Bimtek IKM secara virtual dan jadwal kegiatan lain dari Deputi Rehabilitasi berbenturan.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Anggaran pada Indikator Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional senilai Rp6.945.000,- dengan realisasi Rp 6.915.000 atau 99,57%. Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	103,2	99,57	3,63%

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

Terdapat kegiatan pemantauan dan home visit klien untuk Tahun Anggaran 2024 sehingga hubungan petugas dan klien akan tetap terjaga sehingga diharapkan dapat memudahkan berkomunikasi dengan intens dan tidak sampai kehilangan kontak ketika klien dibutuhkan untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga nilai IKM bisa didapatkan dari data BNN Kabupaten Malang sendiri.

9. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja berikut:

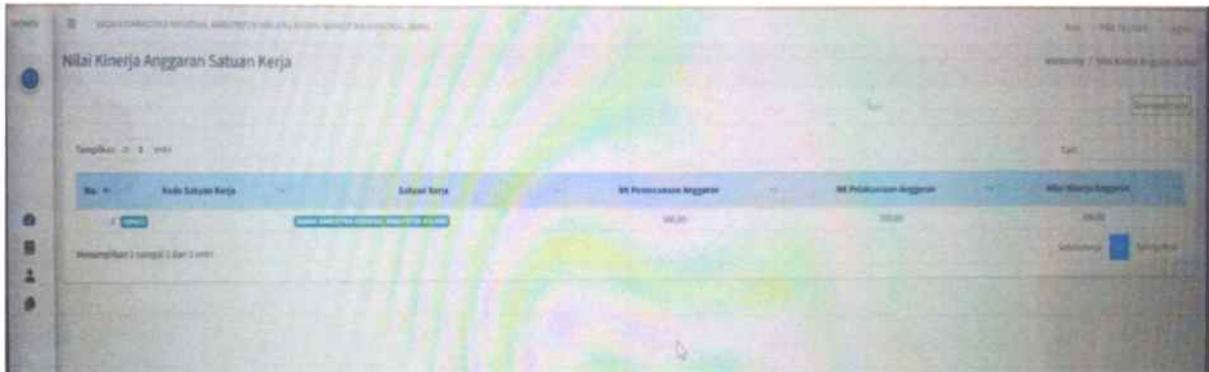
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Malang	87 Indeks	100 Indeks	115%

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan, dan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Nilai Kinerja Anggaran dan Nilai Kinerja Perencanaan.

Realisasi nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kabupaten Malang yang diambil dari aplikasi smart dari kementerian keuangan RI per tanggal 10 Januari 2024 adalah 100 dengan target capaian 87, dengan demikian capaian realisasi melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 115 %. Nilai kinerja yang didapatkan dari website <https://smart.kemenkeu.go.id/>.

Tabel Capaian Nilai Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2024



b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Dan jika dilakukan perbandingan pada tahun sebelumnya capaian Nilai Kinerja BNN Kabupaten Malang mengalami kenaikan dimana tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 87 tercapai sebesar 98,56 Indeks adapaun rincian hasil dapat dilihat dari tabel berikut :

NKA TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	90	85,30	94,77%
2022	87	86,27	99,16%
2023	87	86,28	99,17%
2024	87	100	115%

Dan nilai kinerja tahun 2024 dapat tercapai dikarenakan ada beberapa faktor yakni terdapat realisasi capaian output kegiatan yang melebihi target.

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

- 1) Komitmen satker dalam pelaksanaan kegiatan sesuai timeline;
- 2) Penyempurnaan sistem administrasi dari tahun ketahun.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

- 1) Tidak ada sosialisasi tentang perhitungan NKA dari Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, sehingga Satker tidak dapat memprediksi nilai NKA;
- 2) Nilai NKA pada Aplikasi Sakti baru bisa dilihat pada Bulan Desember sehingga satker tidak mengetahui berapa progres nilai NKA per bulannya.

e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Anggaran pada Indikator Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional senilai Rp7.035.000,- dengan realisasi Rp7.034.000,- atau 99,99%.

Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang	115	99,97	15,03%

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

- 1) Terkait hal tersebut perlu adanya evaluasi fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta kegiatan di BNN Kabupaten Malang. Aspek penilaian ini dilihat dari timeline kegiatan, rencana penarikan dana, realisasi kegiatan, capaian output, capaian dari perjanjian kinerja, pelaporan yang telah diberikan, revisi, realisasi anggaran dan faktor lain yang lebih rinci yang diatur di kementerian keuangan. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.

- 2) Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
- 3) Perubahan peraturan perundangan yang berlaku di satuan kerja di triwulan IV. Secara prinsip, permasalahan tahun ini dalam pelaksanaan anggaran dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok aspek berdasarkan penyebabnya, seperti : perencanaan anggaran, persiapan pelaksanaan kegiatan, dan asimetris informasi serta seringnya perubahan tentang kebijakan dari K/L pusat maupun negara menyebabkan satuan kerja lebih berhati hati dalam melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi.

10 . Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

a. Informasi Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang	99,76 Indeks	100 Indeks	100,3%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kemterian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksana anggaran belanja kementerian/lembaga yang diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu kualitas perencana anggaran 20%, kualitas pelaksana anggaran 55% dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 25%.

Dasar Pengukuran Nilai IKPA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Metode pengukuran IKPA dapat dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN dimana terdapat 8 (delapan) indikator yang memiliki nilai bobot masing-masing, yakni sebagai berikut :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Kategori Nilai IKPA :

- SANGAT BAIK : nilai IKPA ≥ 95
- BAIK : 89 ≤ nilai IKPA < 95
- CUKUP : 70 ≤ nilai IKPA < 89
- KURANG : nilai IKPA < 70

Pada capaian nilai IKPA BNN Kabupaten Malang didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, LPJ Bendahara, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian/ Kesalahan SPM, Pagu Minus, Dispensasi SPM dan Konfirmasi Capaian Output.

Realisasi nilai IKPA BNN Kabupaten Malang tahun 2024 sebesar adalah 100 indeks dengan target capaian 99,76 indeks dengan demikian capaian target mencapai 100,3%. Nilai IKPA yang didapatkan dari website menteri Keuangan di alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id>



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sempai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Isialaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	056	689622	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	30	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				

b. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (Perbandingan Capaian)

Dan jika dilakukan perbandingan pada tahun sebelumnya capaian Nilai Indikator Kinerja BNN Kabupaten Malang mengalami kenaikan dimana tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 99,76 tercapai sebesar 100 Indeks atau 100,3%. Adapaun rincian hasil dapat dilihat dari tabel berikut :

IKPA TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	94	98,17	104 %
2022	95	97,71	103%
2023	92	99,66	108,33 %
2024	99,76	100	100,3%

c. Informasi Detail Kinerja dalam Keberhasilan Mencapai Target Kinerja (Faktor Keberhasilan Capaian)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja untuk TA. 2024 mencapai angka 97,71 Indeks. Meskipun deviasi rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran blm bisa dilakukan secara proporsional sesuai dengan target ideal setiap bulan, namun penyelesaian tagihan dapat akurat dan tepat waktu, penyaluran dana yang sukses tanpa adanya pengembalian/retur, pengelolaan uang muka/uang persediaan yang optimal, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu. Hal ini membuat nilai pencapaian IKPA satuan kerja BNN Kabupaten Malang masih bisa melampaui target yang diharapkan K/L Pusat.

d. Informasi Kualitas Atas Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya (Faktor Hambatan atau Kendala)

Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, serta penyerapan anggaran yang rendah, jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun, dan asimetris informasi dan seringnya perubahan tentang kebijakan dari K/L pusat maupun negara menyebabkan satuan kerja lebih berhati-hati dalam melakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi. Selain itu, banyak sekali persiapan perubahan tatanan kelola keuangan negara melalui aplikasi offline beralih ke online.

- e. Informasi Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**
Anggaran pada Indikator Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional senilai Rp1.043.895.000,- dengan realisasi Rp 1.043.588.187,- atau 99,97%. Nilai efisiensi dapat dilihat dari table berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Kinerja
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang	100,3	99,97	0,33%

f. Informasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya (Rencana Tindak lanjut)

- 1) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN setelah mengisi capaian output perbulannya.
- 2) Meningkatkan kompetensi operator terkait indicator yang mempengaruhi IKPA.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.173.455.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Empat ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.164.476.000,- terealisasi Rp1.155.396.687,- dengan capaian prosentase 99.22%:
- 2) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan pagu sebesar Rp1.008.979.000,- terealisasi Rp1.001.611.750,- dengan capaian prosentase sebesar 99,46% .

Realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024 sebesar 99.24% dimana hal tersebut didapatkan melalui keterangan tabel rincian sebagai berikut :

No	Bidang	Pagu	Blokir AA	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	P2M	Rp513.695.000	Rp -	Rp513.210.000	Rp 485.000	99,91%
2	Rehabilitasi	Rp461.809.000	Rp -	Rp454.936.750	Rp6.872.250	98,51%
3	Berantas	Rp 33.475.000	Rp -	Rp 33.465.000	Rp 10.000	99,97%
4	Subbag Umum	Rp1.164.476.000	Rp8.160.000	Rp1.155.396.687	Rp 919.313	99,22%
	TOTAL	Rp2.173.455.000		Rp2.157.008.437	Rp8.286.563	99,24%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Malang sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN kabupaten Malang telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian nilai kinerja BNN Kabupaten Malang pada tahun 2024 tercapai 100 indeks atau 100% sedangkan untuk capaian keuangan (realisasi anggaran) tercapai 99,24% sedangkan untuk realisasi kegiatan dilihat dari volume output dari target sebesar 1.699 tercapai 1.719 dengan prosentase sebesar 101,18%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut.

- 1) Membangun *Team Building* di salam satuan kerja;
- 2) Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas;
- 4) Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja, sebagai sarana komunikasi, perencanaan anggaran, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;

- 5) Perlu kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan P4GN yang bersinergi, bersama dalam upaya menjadikan Kabupaten Malang Bersih Narkoba;
- 6) Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba;
- 7) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, instansi swasta, dan lingkungan pendidikan serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam P4GN.

Malang, Januari 2024

Kepala BNN Kabupaten Malang



Hendratmo Budi Wibowo, S.Pd
Letkol Laut (PM) NRP. 16301/P



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

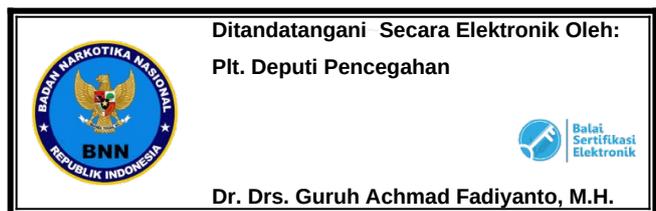
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - c. Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

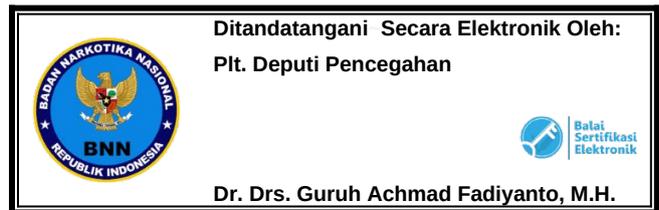
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

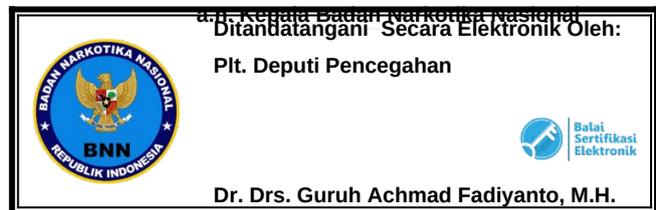
- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAkan	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

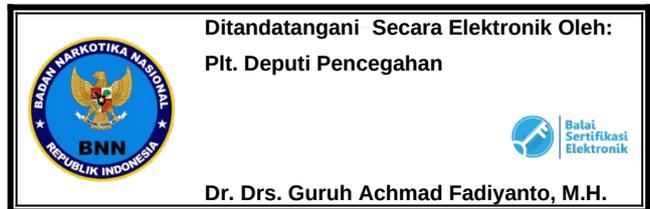
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

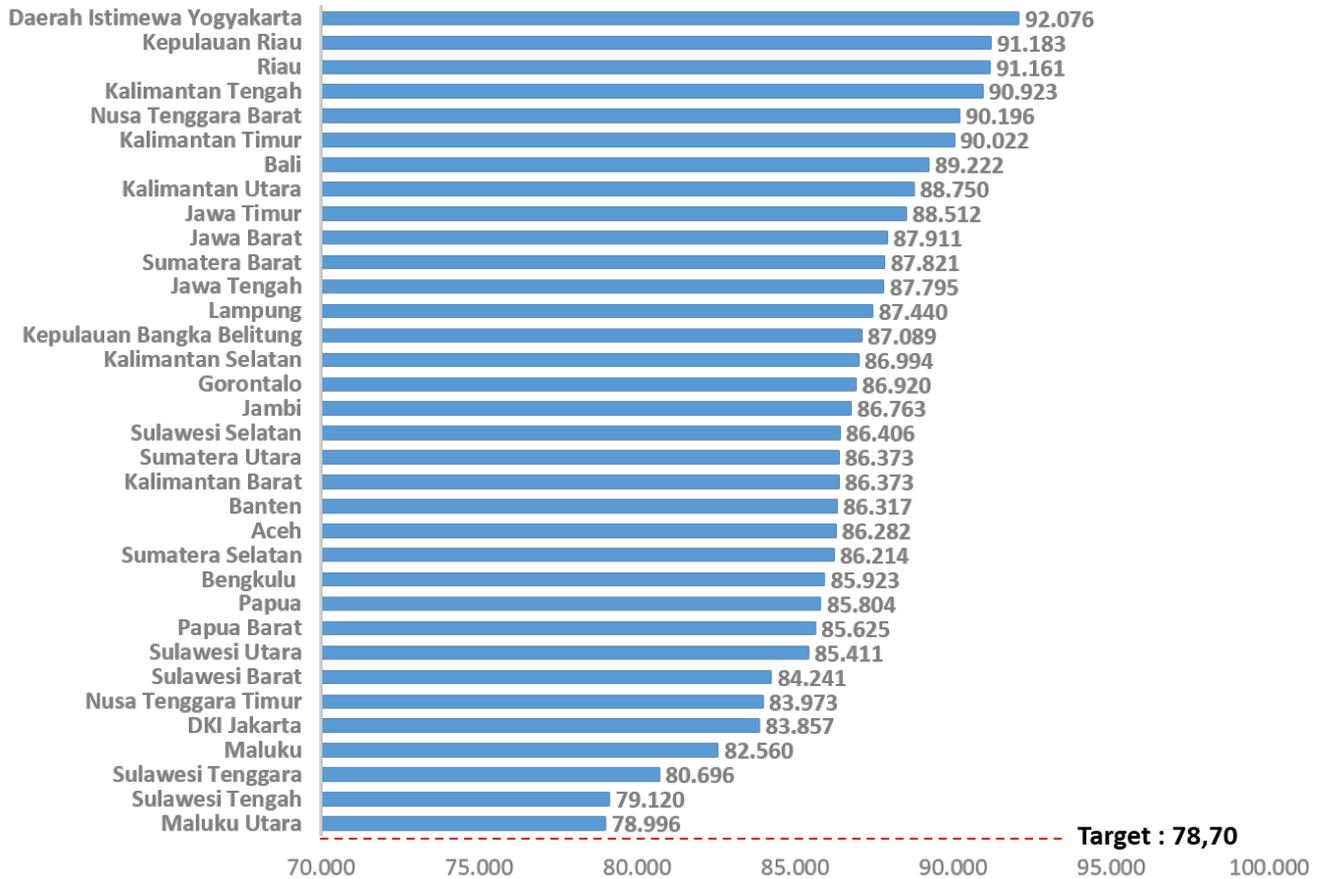
LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI

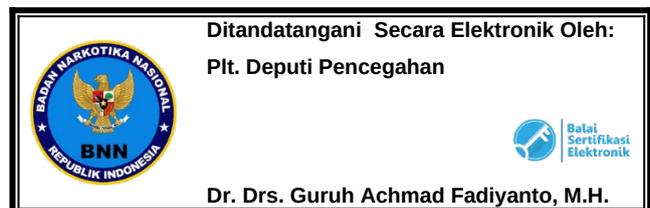
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

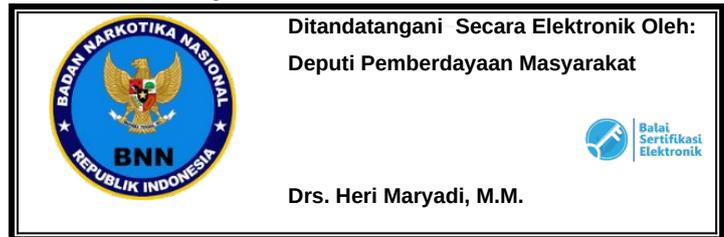
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK T.J. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberdayaan Masyarakat
	Drs. Heri Maryadi, M.M.

